

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. SINAR
MUTIARA PERKASA DALAM PUTUSAN MA.RI NO.
693K/PDT.SUS/2011”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FITRIANIS
NIM. 10927007582

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanannya beliau berhasil membawa umat manusia keluar dari masa kejahiliah menuju kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ali Amri dan Ibunda Diwarti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, doa dan motivasi yang tiada pernah terputus hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan kedua orang Tuaku didunia dan diakhirat. Juga kepada Kakanda Edi Sugiarto yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya, ibu DR. Hertina, M.Pd, (Pembantu Dekan I), Bapak H.M Kastulani, SH.MH. (Pembantu Dekan II), Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, MA (Pembantu Dekan III) yang mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH. Dan sekretaris Jurusan, Bapak H. Maghfirah, MA. Staf Jurusan Ilmu Hukum Bapak M. Ilham. SH.
5. Bapak H.M, Kastulani, SH.MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus SH. MH, bapak Darwis, SHI.MA dan Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas Kepada penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Terimakasih untuk seorang lelaki special dihati Ifriandi, SH yang dengan setia membantu dan menemani penulis dalam segala situasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan ucapan terimakasih buat teman-teman IH1, IH2, IH3, dan IH4 Angkatan 2009 yang telah sama-sama berjuang dengan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dikampus yang dicintai ini, khususnya buat IH2 Fitri Jayanti, Rina Fitri Wartti, Delfi Selfia Nofitri, Heldodi, Wisnu Wijaya, Yusuf dan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah Ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Wassalamu'ailaikum. Wr.Wb.

Pekanbaru, 21 Oktober 2013

FITRIANIS
NIM.10927007582

ABSTRAK

Perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 dimana Pemohon PT. Indokemika Jayatama mengajukan Permohonan Pailit atas Termohon PT. Sinar Mutiara Perkasa dikarenakan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada Pemohon sebagaimana yang telah disepakati pada bulan Juli-Agustus 2000. Dimana Termohon hanya membayar sebagian saja dari utangnya dan PT. Sinar Mutiara Perkasa tidak dapat melunasi utang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan hukum pembuktian sederhana dalam perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 dalam permohonan pailit.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian normative karena dengan cara studi kasus yaitu mempelajari berkas perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini yaitu kualitatif yuridis yaitu berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri.

Pembuktian pada Pengadilan Niaga adalah pembuktian yang ada dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang Kepailitan. Dalam perkara kepailitan, pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian sederhana (*sumiir*) yaitu fakta adanya dua atau lebih kreditur dan fakta adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Mengenai pembuktian sederhana ini, pemohon telah dapat membuktikan bahwa Termohon memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian, penerapan hukum pembuktian sederhana dalam perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa permohonan pailit dalam perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 beralasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat kepailitan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Kepailitan	16
1. Pengertian Kepailitan	16
2. Sejarah Kepailitan	18
3. Prinsip-prinsip Kepailitan	22
B. Peradilan niaga di Indonesia	32
1. Kewenangan peradilan Niaga	32
2. Eksistensi peradilan Niaga di Indonesia	34

BAB III : HUKUM PEMBUKTIAN PADA PRADILAN NIAGA

A. Hukum pembuktian pada pengadilan niaga	38
B. Asas-asas dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia	

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS

**PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN MA.RI NO.693/K/Pdt. Sus/2011 TENTANG
PERMOHONAN PAILIT PT. SINAR MUTIARA PERKASA**

A. Penerapan hukum pembuktian dalam putusan MA.RI No. 693K/Pdt.Sus/2011	46
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara MA.RI No. 693K/Pdt.Sus/2011 terhadap Permohonan Pailit	57
C. Analisis penulis terhadap putusan MA.RI No. 693K/Pdt.Sus/2011	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Untuk mewujudkan kemajuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka oleh karena itu, keberadaan sebuah badan usaha sebagai suatu lembaga berbadan hukum sangat diperlukan. Adapun badan usaha yang dimaksud disini adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang sering disebut dengan perusahaan.

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²

Menurut Molengraaft yang memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 hasil amandemen ke 4.

² Lihat Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

memporniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perniagaan.³

Setiap perseroan (perusahaan) dalam melakukan kegiatan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum dan perbuatan hukum. Di mana hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu perikatan/perjanjian. Maksudnya ialah terhadap hubungan-hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, di mana hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Sehingga perikatan dapat diartikan atau dirumuskan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan yang mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu⁴. Dan juga dapat ditinjau dari isinya ternyata perikatan/perjanjian ada selama seorang debitur harus melakukan prestasi yang mungkin dapat dipaksakan oleh kreditur dengan bantuan hakim.

Didalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.

Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan

³ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*, (Jakarta : Rineka Cipta 2007) h. 3

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta 1997), h. 2

Hakim pengawas.⁵ Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh hakim pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.⁶

Kepailitan merupakan suatu keadaan setelah ada putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public Attachment*).⁷ Pengaturan mengenai kepailitan muncul, pada dasarnya diakibatkan karena akan terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitur tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para kreditor. Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan juga diatur mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan pembayarannya.⁸

Adapun syarat-syarat untuk mempailitkan seseorang yang tidak mampu lagi menjalankan prestasinya adalah sebagai berikut :

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditor (*concursum creditorum*).
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya

⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan.

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 161

⁷ Ricardo Simanjuntak, *UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh*, <http://www.hukumonline.com>, 2008, diakses pada tanggal 13 November 2012.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) h. 6

3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih⁹

Dengan dinyatakan pailit, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit.¹⁰ Akibatnya, jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan Debitur dan sejak saat itu pula semua sita yang dilakukan sebelumnya (jika ada) akan menjadi gugur.

Dikatakan sita umum karena sifat tersebut bukan untuk kepentingan seseorang atau beberapa orang Kreditur, melainkan untuk semua Kreditur. Hal lain yang perlu dimengerti yaitu bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan harta benda pribadi.¹¹ Artinya Debitur tetap Cakap melakukan perbuatan Hukum diluar harta kekayaan perusahaan yaitu harta pribadinya.

Untuk dapat mempailit seseorang maupun badan hukum sudah tentu memerlukan bukti yang cukup. Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan “ Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal pembuktian yaitu adanya batasan

⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), h. 63.

¹⁰ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung.: Mandar Maju 1999), h. 8

¹¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, (Malang; UMM Press 2008), h. 7

waktu dalam perkara di Pengadilan Niaga yang berakibat pembuktiannya dilakukan secara sederhana (*sumiir*).

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun 1998 yang menyatakan:

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Dari penjelasan pasal 8 ayat (4) tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang Debitur yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan
2. Eksistensi dari dua atau lebih Kreditur dari Debitur yang dimohonkan kepailitan.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Indokemika Jayatama (Kreditur) terhadap PT. Sinar Mutiara Perkasa (Debitur) dalam Perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011. Kronologis

kasusnya yakni pada bulan Juli-Agustus 2000 Termohon telah melakukan transaksi pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada Pemohon sebesar USD 211,200 (Dua ratus sebelas ribu dua ratus Dollar Amerika Serikat), selanjutnya pemohon menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur Penjualan kepada Termohon, yaitu sebagai berikut:

1. Faktur penjualan No. 07545 tertanggal 25 Juli 2000 dengan tagihan sebesar USD 140.800,00 (Seratus empat puluh ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 24 Agustus 2000;
2. Faktur penjualan No. 07983 tertanggal 1 Agustus 2000 dengan tagihan sebesar USD 35.200,00 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2000;
3. Faktur penjualan No. 08222 tertanggal 7 Agustus 2000 dengan tagihan sebesar USD 35.200,00 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 6 september 2000.

Bahwa terkait pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada Pemohon sebesar USD 211.200,00 (dua ratus sebelas ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) terhitung sejak tanggal 25 November 2004 Termohon hanya membayar kepada pemohon sebesar USD 76.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Namun, hingga Pernyataan Pailit ini diiajukan oleh Pemohon, kenyataannya Termohon masih belum menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, yaitu sebesar USD 104.700,00 (seratus empat ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat). Pemohon Pailit sudah 4 (empat) kali

mengirimkan surat teguran kepada Termohon, tetapi Termohon tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Termohon tetapi Termohon masih juga tidak beritikad baik untuk segera melunasi sisa kewajiban Termohon sebesar USD 104.700 (seratus empat ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) tersebut.

Disamping memiliki utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Satomo Indovyl Polymer sekarang menjadi PT. Sulfindo Adi Usaha (selanjutnya disebut PT. Sau) sebesar USD 19.000,00 (Sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat) dan pada PT. Eterindo Nusa Graha sebesar USD 124.000,48 (seratus dua puluh empat ribu dollar Amerika Serikat koma empat puluh delapan sen) belum dibayar lunas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai dua utang atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu Pemohon Pailit menganggap Pemohonan Pailit yang diajukan atas diri Termohon Pailit telah memenuhi Syarat kepailitan dengan sempurna.

Termohon dalam bantahannya dalam hal ini PT. Sinar Mutiara Perkasa Merupakan badan Hukum tersendiri dan tidak ada kaitannya atau sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemohon dalam perkara ini. Dimana permohonan pemohon yang didasarkan pada transaksi jual beli PVC Resin dihubungkan dengan Faktur penjualan dan Surat Teguran/Tagihan tersebut ditujukan kepada Bapak Tonny Royanto atas nama PT. Indonesia Pacific Perkasa dan Termohon mengatakan permohonan Pemohon tersebut Error in Persona atau ditujukan kepada pihak yang keliru.

Bahwa Termohon Pailit juga menyatakan bahwa permohonan Pailit telah secara keliru menafsirkan secara sepihak bahwa akaibat hukum tidak terpenuhinya transaksi jual beli PVC Resin tersebut, dianggap sebagai suatu utang yang diperjanjikan dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih padahal peristiwa hukum yang ada adalah menyangkut mengenai Wanprestasi atas suatu transaksi jual beli PVC Resin dan sekali lagi bukan sebagai utang piutang yang telah jatuh temponya. Dimana Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata tentang Wanprestasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan menangani perkara yang terdaftar dengan register No.21/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby pada tanggal 11 Agustus 2011 ini memutuskan bahwa menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Karena permohonan Pailit Pemohon tidak dikabulkan pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Pemohon mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung melalui putusan MA.RI No. 693K/Pdt.Sus/2011 dimana Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengabulkan Permohonan Pemohon (dahulu Pemohon).

Terdapat perbedaan persepsi dan pandangan antara hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim pada pengadilan tingkat Kasasi mengenai pembuktian sederhana yang dimaksudkan oleh undang-undang kepailitan sehingga dengan alasan itu membuat kasus ini menarik untuk diteliti lebih dalam apakah alasan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan Tuntutan Pemohon (dahulu Pemohon) padahal pada Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim menolak tuntutan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menilai permasalahan tersebut perlu untuk dibahas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. SINAR MUTIARA PERKASA DALAM PUTUSAN MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada analisis putusan MA. RI. NO. 693 K/PDT.SUS/2011 TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. SINAR MUTIARA PERKASA”, menyangkut perkara kepailitan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pembuktian dalam putusan MA.RI No. 693 K/Pdt.Sus/2011?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011 terhadap Permohonan Pailit?
3. Bagaimanakah analisis penulis terhadap Putusan MA.RI No. 693 K/Pdt.Sus/2011 tentang permohonan pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pembuktian dalam permohonan pailit dalam perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim No. 693 K/Pdt.Sus/2011 terhadap permohonan Pailit.

3. Untuk mengetahui dari hasil analisis penulis bahwa putusan ini sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dan memperluas kualitas pengetahuan penulis mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan hukum pada suatu putusan dalam perkara kepailitan serta penerapan pembuktiannya.
2. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menggali alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹² Yang berhubungan dengan putusan dalam perkara kepailitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119.

yang berkaitan dengan permohonan pailit oleh PT. Indokemika Jayatama terhadap PT. Sinar Mutiara Perkasa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian Hukum normatif (*doktriner*). Dengan penggunaan metode normatif ini, skripsi ini akan meneliti putusan pengadilan dalam perkara kepailitan dan selanjutnya akan dilakukan perbandingan dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Data dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif atau doktriner, sumber datanya berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹³

Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan MA.RI. No. 693 K/Pdt.Sus/2011 terhadap perkara Permohonan Pailit dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5, 2001), h. 12-14

makalah, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder dalam bentuk kamus, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, jurnal hukum maupun lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan maksud memperoleh gambaran bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara bersangkutan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh, tetapi yang penting adalah menganalisis dan menginterpretasi semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari berkas perkara dengan No. 693 K/Pdt.Sus/2011 selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci. Lalu penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk rangkaian kalimat. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada dan pendapat para ahli.

Metode yang digunakan menganalisis hasil penelitian adalah kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Teknik menggunakan analisis yuridis yaitu menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- BAB I. Bab pertama ini memuat uraian tentang: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II. Bab kedua ini memuat tentang tinjauan secara umum tentang hukum kepailitan dan Peradilan Niaga Di Indonesia.
- BAB III. Bab ketiga ini akan membahas tentang hukum pembuktian pada pengadilan niaga dan asas-asas dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia.
- BAB IV. Bab keempat ini memuat hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit dalam perkara No. 693

K/Pdt.Sus/2011 Yaitu terdiri dari Penerapan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V. Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan uraian ringkas terhadap jawaban permasalahan yang dikemukakan serta saran-saran yang mendukung kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Istilah pailit dijumpai dalam bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “ *faillit*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di sebut dengan *Le Faili*. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failiti* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda atau kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to Fail* dan didalam bahasa latin dipergunakan istilah *failure*.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang daripada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.¹³

Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya

¹³M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailita, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), h. 1

pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.¹⁴

Menurut *Martias gelar Iman Radjo Mulano* mengemukakan hukum pailit sebagai asas dalam BW ditentukan, bahwa seluruh harta kekayaan dari debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

“ Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”¹⁵

Dimana mula-mula kepailitan untuk kasus perdagangan (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, buku ketiga yang

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 26-27

¹⁵ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (peraturan tentang ketidak mampuan pedagang). Aslinya peraturan ini termuat didalam Pasal 749 – 910 W.v.K, dimana peraturan ini hanya untuk para pedangan saja sementara itu kepailitan untuk yang bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S. 1847-52 jo. 1849-63). Tetapi kemudian telah dicabut dan diatur dalam peraturan tersendiri berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening*, sejak tahun 1906 yang dahulu hanya untuk pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.

2. Sejarah Kepailitan

a. Undang-undang Kepailitan Sebelum 1945

Mula-mula kepailitan untuk kasus perdagangan (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, buku ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (peraturan tentang ketidak mampuan pedagang). Aslinya peraturan ini termuat didalam Pasal 749 – 910 W.v.K, dimana peraturan ini hanya untuk para pedangan saja sementara itu kepailitan untuk yang bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S. 1847-52 jo. 1849-63). Tetapi kemudian telah dicabut dan diatur dalam peraturan tersendiri berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter invoering van de*

Faillissementsverordening, sejak tahun 1906 yang dahulu hanya untuk pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.¹⁶

b. Undang-undang Kepailitan Sejak 1945

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ada kurun sejarah sehubungan dengan berlakunya *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan), yaitu:

1. Periode 1945-1947

Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut:

“ segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”

Berdasarkan peraturan peralihan tersebut, pada periode ini seluruh perangkat hukum yang berasal dari Hindia-Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali setelah diuji bertentangan dengan Pancasila dan ketentuan Undang-undang Dasar. Jadi, setelah Proklamasi Kemerdekaan untuk kepailitan berlaku *Faillissementsverordening* S. 1905-217 jo s.1906-348 yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “ peraturan Kepailitan”.

2. Periode Tahun 1947

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodstregeling Faillissementen 1947*). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan

¹⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet. ke-5), h. 131

kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah selesai jadi Peraturan Darurat Kepailitan ini telah dicabut.

3. Periode 1947-2004

Di dalam praktiknya *Faillissementsverordening* relative sangat sedikit digunakan. Factor penyebabnya antara lain karena keberadaaan peraturan itu ditengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya kemasyarakat sangat minim. Awalnya, *Faillissementsverordening* berlaku untuk pedagang dilingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang Barat saja. Akibatnya, *Faillissementsverordening* itu tidak dirasakan sebagai peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi. Dan juga sebagian besar masyarakat, pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih banyak belum melakukan transaksi bisnis yang besar-besaran. Dan juga karena persepsi masyarakat yang negatife terhadap badan peradilan, masyarakat merasa tidak ada saran efektif yang dapat digunakan kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya.

4. Periode tahun 1998-2004

Pada bulan juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis politik juga terjadi yang mengakibatkan lengsernya Soeharto Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal itu mengakibatkan utang-utang bagi para pengusaha Indonesia, dimana kredit pengusaha diluar negeri menjadi

membengkak sehingga pengusaha Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya.

Krisis ini membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman.

Berdasarkan adanya tuntutan dan kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak itu, maka pada tanggal 22 April 1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.

Segi-segi pokok penyempurnaan undang-undang kepailitan itu menyangkut beberapa hal yaitu:

1. Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh pengadilan;
2. Penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit;
3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit bahwa itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan segala tata cara dan kerangka waktunya;

5. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
6. Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan hakim-hakim yang bertugas secara khusus.

Akhirnya pada tanggal 9 september 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang.¹⁷ Sesuai perjanjian setelah diundangkan UU. No. 4 Tahun 1999, seharusnya RUU tentang kepailitan sudah disampaikan kepada DPR RI, karena adanya beberapa hambatan ternyata RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada akhirnya pemerintah berhasil menyusun RUU dan setelah dibahas dengan DPR lalu kemudian diundangkan menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Prinsip-prinsip Kepailitan

a. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip Paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) adalah suatu prinsip yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah

¹⁷ Zainal Asikin, Op. Cit, h. 21

dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Filosofi dari prinsip ini adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara hutang debitor terhadap para krediturnya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut.

Tetapi didalam prinsip ini adanya ketidakadilan dimana menyamaratakan kedudukan para kreditor. Betapa tidak adilnya seorang kreditor yang memiliki piutang lebih banyak disamakan dengan kreditor yang memiliki hutang yang lebih sedikit.

b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip pari passu prorata parte adalah suatu harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara profesional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor ataupun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung

dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional , dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapat porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar daripada kreditor yang memiliki piutang yang lebih kecil daripadanya. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan sendiri.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* kurang tepat atau kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset yang besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Pastinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari passive dan kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Dan kepailitan juga digunakan untuk melindungi kreditor yang lebih lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor.

c. Prinsip Structured Creditors

Prinsip structured creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan debitor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor separatis sudah memegang jaminan kebendaan dan ia dapat mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi kreditor separatis tersebut masih memiliki kepentingan yang berupa sisa tagihan yang tidak cukup ditutup dengan eksekusi jaminan serta kepentingan mengenai keberlangsungan usaha debitor.
2. Kreditor preferen (kreditor dengan hak istimewa) adalah kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara.
3. Kreditor konkuren (kreditor bersaing) adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.

Ketiga kreditor tersebut diakui eksistensinya. Di dalam UU Kepailitan tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan preferen untuk mengajukan kepailitan. Ketiga prinsip diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang memiliki banyak debitor di mana tanpa adanya kepailitan maka

para debitor akan saling berebut baik secara sah maupun secara tidak sah sehingga akan menimbulkan keadaan ketidakadilan bagi kreditor.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau yang sering disebut kreditor separatis dan kreditor yang menurut hukum harus didahulukan (kreditor preferen). Memang kreditor separatis sudah memegang jaminan kebendaan dan ia dapat mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi kreditor separatis tersebut masih memiliki kepentingan yang berupa sisa tagihan yang tidak cukup ditutup dengan eksekusi jaminan serta kepentingan mengenai keberlangsungan usaha debitor.

d. Prinsip Utang

Didalam hukum kepailitan, prinsip utang selain batasan dari definisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit. Jadi prinsip utang adalah pembatasan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (dibawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Disamping itu pula, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas.

Pembatasan nilai minimum utang hanya berkaitan dengan *legal standing in judicio* (kewenangan untuk mengajukan perkara) sedangkan pengakuan

kreditor yang di bawah nilai minimal tersebut dalam proses pembagian harta pailit sama dengan kreditor lainnya secara proporsional.

e. Prinsip Debt Collection

Prinsip debt collection adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor atau harta debitor. Fungsi dari prinsip debt collection adalah sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Dengan cara lain yaitu dengan cara *excecutorial attachment* (sita eksekutorial).

Jadi, prinsip debt collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitor dengan cara melakukan likuidasi aset-asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan aset-aset debitor dengan jalan melikuidasi aset-aset debitor. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

f. Prinsip Debt Pooling

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan *prinsip pari pasu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor.

Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi diantara kreditornya. Penjabaran sistem ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisar dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan. Dan prinsip *debt pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetisi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim komisar dan kurator serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.

g. Prinsip Debt Forgiveness

Prinsip debt forgiveness mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya yakni

merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula.

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitor atau yang dikenal dengan nama PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) untuk jangka waktu yang ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari boedel pailit (asset exemption), *dishcharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang yang benar-benar tidak terpenuhinya), diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan *skim* kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa suatu undang-undang kepailitan yang baik adalah harus dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu maka undang-undang kepailitan yang baik itu seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja tetapi kepentingan debitor dan stake holdernya juga harus diperhatikan.

h. Prinsip Universal Dan Prinsip Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan adalah suatu putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.

Prinsip umum mengenai territorial putusan pengadilan suatu Negara tersebut, berlaku juga pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Putusan pailit suatu pengadilan dari suatu Negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan Negara lain. Kenyataan ini pada suatu segi dapat menjadi kebuntuan terhadap para pelaku usaha yang melintas batas suatu Negara.

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa untuk mengatasi kebuntuan tersebut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* melakukan terobosan yang memungkinkan sebuah Negara mengakui dan melaksanakan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing. Dimana terobosan ini berupa penyiapan sebuah *model law* yang memungkinkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh pengadilan suatu Negara.

Apabila terdapat perbenturan antara prinsip universal dengan prinsip territorial, maka yang akan dipakai adalah prinsip territorial. Hal ini karena kedaulatan suatu Negara akan berada diatas kekuatan hukum manapun dan pendekatan asli dari suatu *cross border insolvency* adalah prinsip territorial.

Prinsip territorial akan dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan-kesepakatan internasional atau suatu Negara tersebut sama-sama menganut prinsip universal. Pada dimensi lain, bisa diupayakan dengan mengajukan permohonan pailit kebeberapa Negara yang terdapat harta debitor tersebut.

i. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress

Prinsip commercial exit financial distress adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitor.

Prinsip commercial exit financial distress merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara teoritis, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas.¹⁸

B. Peradilan Niaga di Indonesia

1. Kewenangan Peradilan Niaga

Pembentukan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektifitas.

¹⁸ M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h. 27-50

Perkara-perkara kepailitan menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan jangka waktu pemeriksaannya ditingkat pengadilan niaga, di tingkat kasasi maupun ditingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah agung tanpa upaya banding kepengadilan tinggi.¹⁹

Menurut pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan;

Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penempatannya dilakukan dengan undang-undang.²⁰

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolute untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.²¹ pada saat ini pengadilan niaga telah pula memeriksa perkara-perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai perwujudan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU.

Dengan adanya ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, h. 141

²⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, PT. Alumni 2006), h. 227

²¹ Jono, Op. Cit, h. 84

undang-undang tentang Kepailitan hanya dapat diajukan kepengadilan niaga. Setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 300 ayat (2) UUK-PKPU, perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada pengadilan niaga.²²

Selain itu, Undang-undang Kepailitan juga mempertegaskan Kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi:

“ pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ” .

Pasal 303 Undang-undang Kepailitan memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Eksistensi Peradilan Niaga

Peradilan niaga merupakan bagian dari peradilan umum. pengadilan niaga hanya merupakan *chamber* dari pengadilan umum, seperti halnya dengan pengadilan anak atau pengadilan lalu lintas. Oleh karena itu pengadilan niaga

²² Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, h. 142

berada di lingkungan peradilan umum, maka tidak ada jabatan ketua pengadilan niaga karena ketua pengadilan negeri yang bersangkutan juga membawahkan pengadilan niaga. Sesuai dengan yang dikemukakan dalam Pasal 306 ayat (1) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 UU Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.”²³

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima Permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 281 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 ditegaskan bahwa pembentukan pengadilan niaga selain sebagaimana dimaksud oleh ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan

²³ Jono, Op. Cit, h. 83

Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya beserta pembagian wilayah yurisdiksi relative perkara yang diajukan kepengadilan Niaga yaitu:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur.
4. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴

Dengan pembagian kewenangan tersebut, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas daerah hukumnya yang meliputi provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat. Untuk mengatasi masa peralihan

²⁴ *Ibid*, h. 83

kewenangan antara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri lainnya, dalam Pasal 4 Kepres No. 97 Tahun 1999 ditentukan:

1. Sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 pada keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
2. Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadillan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.²⁵

²⁵ *Ibid*,

BAB III

HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN NIAGA

A. Hukum Pembuktian Pada Peradilan Niaga

Pada pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan ada dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal pembuktian yaitu adanya batasan waktu dalam berperkara di Pengadilan Niaga yang berakibat pembuktiannya dilakukan secara sederhana (*sumir*).³⁷

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan sebagai berikut:

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” .

Yang dimaksud dengan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dari fakta utang yang telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar . sedangkan perbedaan besarnya

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 148

jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.³⁸

Jadi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Pembuktian sederhana adalah pembuktian Sederhana mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo;
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.³⁹

Dimana bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan keadaannya merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailitnya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka majelis hakim Pengadilan Niaga atau majelis hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan Pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa). Majelis Hakim Pengadilan

³⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *pedoman menanggapi perkara Pailit*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), h. 133

³⁹ *Ibid*,

Niaga maupun Majelis Hakim Kasasi wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawab dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan pengadilan negeri mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya.⁴⁰

Menurut Subekti, Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pada ketentuan umum dalam hukum acara perdata didalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata, yang serupa dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang secara lengkapnya berbunyi:

“ Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.⁴¹

Dari ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR tersebut dapat diketahui pihak yang berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan permohonan kepailitan yang diajukan. Dengan demikian, selama dan sepanjang pihak yang memohon kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa:

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 149-150

⁴¹ Herzein inlandsch reglement (HIR) pasal 163

1. Jika diajukan oleh debitor, ia telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo; atau jika diajukan oleh kreditor, utangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo;
2. Bahwa debitor yang mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari dua kreditor.

Dalam konteks yang pertama, pembuktian mengenai keberadaan utang haruslah jelas merupakan suatu utang yang tidak dapat lagi dibantah keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi kewajiban tersebut, atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya dengan lewat jangka waktu tersebut debitor juga tidak memenuhinya. Dalam hal ini juga harus diperhatikan apakah terdapat perikatan bersyarat yang menjadi sebab jatuh temponya utang debitor. Sehingga semua itu harus diajukan dengan bukti yang jelas dan sederhana oleh debitor atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

Dalam konteks pembuktian utang, harus jelas merupakan utang yang telah diakui oleh debitor. Dalam hal debitor menolak permohonan pailit yang diajukan kreditor, maka pihak yang menolak (debitor) permohonan pailit tersebut harus mengajukan bukti yang kuat dimuka pengadilan, mengenai:

1. Bahwa utang yang dijadikan sebagai dasar permohonan kepailitan sudah tidak ada lagi, dengan pengertian utang tersebut telah hapus sepenuhnya, atau telah dinovasi menjadi utang baru;

2. Bahwa kreditor tidak berhak lagi mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepada bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah dialihkan, atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga, baik kawan debitor, seorang penanggung atau bahkan pihak lainnya;
3. Bahwa utang tersebut belum jatuh tempo, oleh karena telah diadakan penjadwalan utang; dan
4. Bahwa ia tidak lagi memiliki utang kepada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan, baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor.

Dengan demikian, jika debitor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor), selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa;

1. Kreditor yang mengajukan kepailitan tidak berhak lagi atas piutang yang diajukan sebagai dasar permohonan kepailitan (untuk kepailitan yang diajukan oleh kreditor);
2. Utang yang diajukan sebagai dasar permohonan kepailitan tidak telah atau belum jatuh tempo; dan
3. Tidak ada kreditor kedua.⁴²

Maka demi hukum debitor harus dinyatakan pailit.

B. Asas-asas dalam undang-undang Kepailitan di Indonesia

⁴² Kartini muljadi, gunawan widjaja, *Op. cit*, h.134-136

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi yang telah diadakan. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut diatas yang diatur secara umum, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Srie Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua krediturnya.

2. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

1. Asas keseimbangan

Ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas keadilan

Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.⁴³

⁴³ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006), h. 22-23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Putusan MA.RI No. 693 K/Pdt.Sus/2011

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam berperkara karena menjadi penentu dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan dalam perkara perdata. Pembuktian diperlukan hanya apabila ada perselisihan atau persengketaan yang terjadi di persidangan.

R. Soebekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁵

Oleh karena membuktikan itu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, maka dengan sendirinya segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim dimuka sidang tidak perlu dibuktikan.

Pengertian “ membuktikan “ dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Pembagian beban pembuktian merupakan tugas pengadilan atau hakim semata-mata, artinya bahwa hakimlah yang akan menentukan apa yang harus

⁴⁵R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2010), h. 1

dibuktikan dan pihak mana yang harus memikul resiko beban pembuktian. Maka dari itu, hakim dalam memikul pembebanan pembuktian harus bersikap adil dan menjaga adanya keseimbangan dalam memberi beban pembuktian. Hal tersebut berarti bahwa hukum dalam memberi beban pembuktian tidak boleh berat sebelah.⁴⁶

Pembuktian pada pengadilan niaga adalah pembuktian dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan, “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal pembuktian yaitu adanya batasan waktu dalam berperkara di Pengadilan Niaga yang berakibat pembuktiannya dilakukan secara sederhana (*sumiir*).

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun 1998 yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.⁴⁷

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), h. 519

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, h.148

Sedangkan yang dimaksud dengan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil Pemohon pada proses pemeriksaan kepailitan adalah alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam aturan Pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan sumpah.

Dari deretan alat bukti tersebut, pada dasarnya alat bukti dapat dibagi menjadi alat bukti tertulis dan alat bukti tidak tertulis dan yang diprioritaskan disini adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis (surat) dapat berupa akta (baik otentik maupun akta dibawah tangan) dan surat bukan akta. Fungsi akta itu sendiri sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum serta sebagai alat pembuktian.

Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, foto copy artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan Mahkamah Agung dimana Termohon Pailit/debitur juga menjadi debitur/Termohon Pailit pada kasus lainnya.

Perkara Nomor 693K/Pdt. Sus/2011 merupakan perkara gugatan kepailitan dengan para pihak PT. Indokemika Jayatama yang berkedudukan di

Wisma UIC lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) dan PT. Sinar Mutiara Perkasa yang berkedudukan di Sidoarjo sebagai Termohon Kasasi (Dahulu Termohon). Bahwa pada pengadilan Tingkat Pertama PT. Indokemika Jayatama sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT. Sinar Mutiara Perkasa di Pengadilan Niaga Surabaya.

Pada Pengadilan Niaga Surabaya, PT. Indokemika Jayatama mendalilkan adanya kewajiban/utang dari Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk membuktikan haknya tersebut, maka yang sangat penting disini adalah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka pengadilan, sebab bukti-bukti yang diajukan inilah yang akan mengungkap kebenaran suatu peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi.

Dalam konteks pembuktian utang, harus jelas merupakan utang yang telah diakui oleh debitur. Dalam hal debitur menolak permohonan pailit yang diajukan kreditur, maka pihak yang menolak (debitur) permohonan pailit tersebut harus mengajukan bukti yang kuat dimuka pengadilan, mengenai:

1. Bahwa utang yang dijadikan sebagai dasar permohonan kepailitan sudah tidak ada lagi dengan pengertian bahwa utang tersebut telah hapus sepenuhnya, atau telah dinovasi menjadi utang baru;
2. Bahwa kreditor tidak berhak lagi mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepada bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah

dialihkan, atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga, baik kawan debitor, seorang penanggung atau bahkan pihak lainnya,

3. Bahwa utang tersebut belum jatuh tempo, oleh karena telah diadakan penjadwalan utang; dan
4. Bahwa ia tidak lagi memiliki utang kepada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan, baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor.⁴⁸

Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam Permohonannya untuk membuktikan haknya tersebut dihadapan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 693K/Pdt. Sus/2011/PN.Niaga. Sby antara lain:

1. Faktur penjualan No. 07545 tertanggal 25 Juli 2000 dengan tagihan sebesar USD 140.800,00 (Seratus empat puluh ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 24 Agustus 2000, Bukti P-1
2. Faktur penjualan No. 07983 tertanggal 1 Agustus 2000 dengan tagihan sebesar USD 35.200,00 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2000, Bukti P-2
3. Faktur penjualan No. 08222 tertanggal 7 Agustus 2000 dengan tagihan sebesar USD 35.200,00 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) jatuh tempo tanggal 6 september 2000, Bukti P-3
4. Surat No. 28/IS/VIII/00 tertanggal 28 Agustus 2000, perihal: Tagihan, Bukti P-4

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, h. 134-136

5. Surat No. 36/IS/ X/00 tertanggal 20 Oktober 2000, Perihal: Tagihan, Bukti P-5
6. Surat No. 016/IS/IV/2001 tertanggal 19 Maret 2001, Perihal: Tagihan, Bukti P-6
7. Surat No. 002/IJ/II/00 tertanggal 20 Februari 2001, Perihal: Peringatan ke I, Bukti P-7
8. Surat Ref. No. 05-04/SK-RPS/2008 tanggal 8 Mei 2008 perihal surat permintaan penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, Up. Bpk. Tonny Royanto, Bukti P-8
9. Surat Ref. No. 05-07/SK-RSP/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Teguran untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pemohon (somasi), yang ditujukan kepada Termohon. Up. Bpk. Tonny Royanto/ Ibu Liliek, Bukti P-9
10. Surat Ref. No. 06-05/SK-RSP/2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Teguran untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pemohon (somasi) yang ditujukan kepada Termohon, up. Bpk. Tonny Royanto/ Ibu Liliek, Bukti P-10
11. Surat Ref. No. 09-04/SK-RSP/2008 tanggal 1 September 2008 perihal Teguran ketiga untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pemohon (somasi III), yang ditujukan kepada Termohon, up. Bpk. Tonny Royanto/ Ibu Liliek, Bukti P-11
12. Surat Ref. No. 11-07/SK-RSP/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Teguran Terakhir untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pemohon

(somasi terakhir), yang ditujukan kepada Termohon, up. Bpk. Tonny Royanto/ Ibu Liliek, Bukti P-12

13. Surat PT. Sinar Mutiara Perkasa Perihal Cicilan Utang yang didalamnya secara tegas menyatakan:

“sebagai wujud itikad baik kami untuk segera menyelesaikan hutang kami atas invoice No. 07545, 07983, dan 08222 dengan jumlah total USD 181,200 yang menyisakan saldo per Mei 2006 sebesar USD 106,700 maka kami akan membayar cicilan sebagai berikut...,” Bukti P-18

14. Surat Ananto Haryo & Rekan No. 055/AH-tgpn smsi/PT.SMP/VI/2008 perihal Tanggapan atas somasi tanggal 28 Mei 2008 yang didalamnya menyatakan:

“ bahwa menurut klien kami ada ketidaksamaan terhadap nilai perincian sebesar USD 104.700 (seratus empat ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) yang rekan sampaikan dalam somasi, oleh karenanya perlu adanya penyamaan persepsi terhadap nilai rincian tersebut”. Bukti P-19

15. Judex facti mengakui kedudukan Tony Royanto adalah sebagai komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa, Bukti T-1

16. Surat yang menyatakan suatu badan Hukum, Bukti T-4

Berdasarkan bukti-bukti diatas, merupakan dokumen penting PT. Indokemika Jayatama yang wajib disimpan dan dapat dibuktikan di pengadilan jika sewaktu-waktu salah satu dari mereka melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan: “ Dokumen perusahaan merupakan data catatan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik secara tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.”⁴⁹

Adapun bukti-bukti tersebut telah diperiksa di depan persidangan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah terbukti secara sederhana sesuai fakta atau keadaan adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU.

Mengingat bahwa dalam perkara kepailitan, untuk mengajukan permohonan pailit selain harus memenuhi syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka juga harus ada kreditur lain selain Pemohon Pailit. Adapun kreditur lain yang diajukan oleh Pemohon pailit sehubungan dengan pengajuan permohonan pailit ini adalah PT. Sulfindo Adi Usaha yang berkedudukan di Senayan City, Panin Tower Lantai 9, Jl. Asia Afrikan lot 19, Jakarta. Termohon masih memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo kepada PT. Sulfindo Adi Usaha sebesar USD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 42.352.150 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh Rupiah) berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

⁴⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 angka 2

1. Invoice No. 0691/INV/SIP/VIII/2001 tentang Pembelian Resin oleh Termohon Kasasi kepada PT. Sulfindo Adi Usaha, Bukti P-13A
2. Invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001 tentang Pembelian Resin oleh Termohon Kasasi kepada PT. Sulfindo Adi Usaha, Bukti P-13B
3. Invoice No. 0830/INV/SIP/X/2001 tentang Pembelian Resin oleh Termohon Kasasi kepada PT. Sulfindo Adi Usaha, Bukti P-13C
4. Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001 tentang Pembelian Resin oleh Termohon Kasasi kepada PT. Sulfindo Adi Usaha, Bukti P-13D
5. KL I-3, Surat No. 008/SMP/IX/2003 tanggal 15 September 2003 perihal pembayaran pembelian resin menyatakan sebagai berikut:

“ menegaskan pembicaraan dengan Bapak pada tanggal 10/9/2003 dan fax Bapak perihal tersebut di atas dengan jumlah sebesar USD 26.500-“
6. KL I-4, Surat No. 042/SIP/FA/IX/2003 tanggal 19 September 2003 perihal kewajiban pembayaran pembelian resin sesuai invoice No. 0691/INV/SIP/VIII/2001, invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001, Invoice No. 0830/INV/SIP/X/2001, Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001
7. KL I-5, Surat No. 009/SMP/IX/2003 tanggal 19 September 2003 perihal pembayaran Ppn (vide Bukti KL I-5) merupakan surat balasan/ jawaban atas surat yang telah diajukan oleh Kreditur Lain yaitu KL I-4, Surat No. 042/SIP/FA/IX/2003 tanggal 19 September 2003.
8. KL I-6, Surat tanggal 29 Desember 2003 perihal peringatan terakhir terhadap tagihan yang telah lama jatuh tempo atas invoice No. 0691/INV/SIP/VIII/2001, invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001, Invoice

No. 0830/INV/SIP/X/2001, Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001 (bukti kode P-13A s/d P-13D)

9. KL I-7, Surat No. 009/SMP/I.2004 tanggal 23 Januari 2004 perihal pembayaran tagihan yang menyatakan sebagai berikut:

“ Menunjuk surat Bapak tanggal 29 Desember 2003 dan menegaskan pembicaraan dengan Bapak Ali perihal tersebut diatas, berikut kami sampaikan rencana/usulan penyelesaian tunggakan-tunggakan kami sebagai berikut...”

Ini merupakan surat balasan / jawaban atas surat yang telah diajukan kreditur Lain I.

Jadi berdasarkan bukti-bukti dari PT. Sulfindo Adi Usaha diatas, maka terbukti bahwa Termohon mempunyai dua orang kreditur atau lebih sehingga telah memenuhi syarat sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Terhadap utang Termohon kepada kreditur-krediturnya tersebut, telah ditentukan pada waktu dan tanggal-tanggal tertentu untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak melakukan pembayaran kewajiban/utang yang dimaksud sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.

Perkara Kepailitan Nomor 693K/Pdt. Sus/2011 ini telah secara sederhana memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit, karena:

- a. Termohon Kasasi telah terbukti mempunyai dua kreditur atau lebih yaitu Pemohon (PT. Indokemiko Jayatama) dengan piutang sebesar USD 104,700.00 (seratus empat ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), kepada PT. Sulfindo Adi Usaha sebesar USD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 42.352.150,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan juga kepada PT. Eterindo Nusa Graha sebesar USD 124,000,48 (seratus dua puluh empat ribu dollar Amerika Serikat koma empat puluh delapan) belum dibayar lunas.
- b. Termohon tidak membayar lunas utang tersebut kepada Pemohon dan Kreditur Lain yaitu PT. Sulfindo Adi Usaha dan PT. Eterindo Nusa Graha yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih, walaupun telah ditegur secara lisan/ tulisan oleh Pemohon hingga permohonan pailit ini didaftarkan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari pemohon Kasasi (PT. Indokemika Jayatama) tersebut dengan perkara Nomor 693K/ Pdt. Sus/2011 telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon (PT. Indokemika Jayatama) dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 21/pailit/2011/PN. Niaga/Sby dimana pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana hakim tingkat pertama

hanya menilai dan melihat sebagian alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011 terhadap Permohonan Pailit

Upaya hukum atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain tidak ada banding atas putusan kepailitan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 yang menyatakan: “ Upaya yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.⁵⁰ Peniadaan hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan.

Permohonan kasasi, selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Bahwa dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim hanya meneliti penerapan hukumnya apakah sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan Kasasi itu karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

⁵⁰ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 11

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menngancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁵¹

Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung apabila menurut pendapat/penilaian Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ternyata Judex Factie (Hakim Tingkat Pertama) tidak salah dalam penerapan hukum, tidak terdapat kelalaian dalam acara maupun Judex Factie (Hakim Tingkat Pertama) ternyata tidak melampaui wewenangnya. Dalam hal demikian Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi.⁵²

Apabila putusan pailit kemudian dibatalkan sebagai akibat kasasi atau peninjauan kembali, maka semua tindakan hukum yang dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan pembatalan putusan tersebut tetap berlaku dan mengikat debitur. Meskipun demikian, kurator tetap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.⁵³

Pada putusan pengadilan Niaga Surabaya, pihak Pemohon PT. Indokemika Jayatama mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung yang mana terdaftar dengan register No. 693K/Pdt.Sus/2011. Terhadap permohonan kasasi atas perkara tersebut, Majelis Hakim Kasasi dalam mengambil

⁵¹ R. Subekti, *Op. Cit*, h. 165

⁵² Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), h. 177-178

⁵³ Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Pasal 67C Undang-undang No. 4 Tahun 1998

keputusan telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perkara tersebut. Dalam alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu:

Yang mana Pemohon Kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Dilihat didalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu: “ menimbang bahwa debitor dalam permohonan pernyataan pailit ini adalah Termohon, yaitu PT. Sinar Mutiara Perkasa, yang merupakan badan hukum, maka menurut Majelis hakim suatu Perseroan Terbatas diwakili oleh direkturnya.

“ Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hubungan jual beli PVC Resin, yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah antara Pemohon dengan Termohon atautkah antara Pemohon dengan pihak lain.

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P4 menunjukkan faktur penjualan dan P-5, P-6, dan P-7 menunjukkan tagihan-tagihan Pemohon Kasasi, ternyata tagihan-tagihan/ invoice-invoice dari Pemohon ditujukan kepada Tony Royanto, yang berdasarkan bukti surat bertanda T-1 menjabat sebagai komisaris PT. Sinar mutiara Perkasa (Termohon) dan suatu badan hukum (bukti surat bertanda T-4).

“ Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan fakta tagihan-tagihan/invoice-invoice Pemohon tersebut ditujukan kepada Tony Royanto yang menjabat sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon).

“ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon) dengan Pemohon perihal transaksi jual beli PVC Resin tidak Terbukti.”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selain bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-7 tersebut, Pemohon Kasasi juga telah menyertakan bukti dengan kode:

- a. P-18 Surat PT. Sinar Mutiara Perkasa Perihal Cicilan Hutang yang didalamnya secara tegas menyatakan:

“sebagai wujud itikad baik kami untuk segera menyelesaikan hutang kami atas invoice No. 07545, 07983, dan 08222 dengan jumlah total USD 181,200 yang menyisakan saldo per Mei 2006 sebesar USD 106,700 maka kami akan membayar cicilan sebagai berikut....”

- b. P-19 Surat Ananto Haryo & Rekan No. 055/AH-tgpn smsi/PT. SMP/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal tanggapan atas somasi tanggal 28 Mei yang didalamnya menyatakan:

“ Bahwa menurut klien kami ada ketidaksamaan terhadap nilai perincian sebesar USD 104.700 (seratus empat ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang rekan sampaikan dalam somasi, oleh karenanya perlu adanya penyamaan persepsi terhadap nilai rincian tersebut”.

Berdasarkan bukti tertulis dengan kode P-18 dan P-19 tersebut. Sebenarnya terlihat jelas adanya pengakuan utang dari Termohon Kasasi kepada Pemohon sehubungan adanya transaksi pembelian PVC Resin, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat invoice No. 07545, 07983, dan

08222 (vide Bukti dengan kode P-1, P-2, dan P3). Dimana dalam bukti surat tersebut secara tegas Termohon Kasasi menggunakan kop surat “PT. Sinar Mutiara Perkasa” incasu Termohon kasasi.

Selain itu Judex Facti telah mengakui kedudukan Tony Royanto adalah sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (incasu Termohon Kasasi)sesuai dengan bukti T-1, dimana jelas dan nyata ada hubungan hukum antara Tony Royanto dengan PT. Sinar Mutiara Perkasa incasu Termohon Pailit. Sehingga judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian apabila menilai tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Mengingat bukti tertulis dengan kode P-18 dan P-19 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu pemohon pailit) tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti, maka jelas dan tegas Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Selain itu Kreditur lain I juga telah menyertakan alat bukti dengan kode:

- a. KL I-3, Surat No. 008/SMP/IX/2003 tanggal 15 September 2003 perihal pembayaran Pembelian Resin menyatakan sebagai berikut:

“ menegaskan pembicaraan dengan Bapak pada tanggal 10/9/2003 dan fax Bapak perihal tersebut di atas dengan jumlah sebesar USD 26.500,-“

Ini menunjukkan dan membuktikan adanya pengakuan hutang kepada kreditur Lain I mengenai pembelian Resin mengenai pembelian Resin sebagaimana dimaksud dalam Invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001

(vide bukti Kode P-13B), Invoice No. 0830/INV/SIP/X/2001 (vide Bukti Kode P-13C), dan Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001 (vide Bukti Kode P-13D).

- b. KL I-5 Surat No. 009/SMP/IX/2003 tanggal 19 September 2003 perihal Pembayaran Ppn menyatakan sebagai berikut:

“ Menunjuk Surat Bapak nomor 041/SIP/FA/IX/2003 tertanggal 19 September 2003 perihal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa untuk pembayaran Ppn sebesar Rp. 42.352.150,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) kami rencanakan pembayarannya setelah kewajiban kami sebesar USD 26,500,00 sudah terselesaikan pada bulan Desember 2003....”.

Ini adalah jawaban atau balasan atas surat yang telah diajukan oleh Kreditur Lain I yaitu nomor 042/SIP/FA/IX/2003 tanggal 19 September 2003 (vide Kode KL I-4), dimana didalam surat tersebut dijelaskan mengenai kewajiban pembayaran pembelian Resin sesuai invoice No. 0691/INV/SIP/VIII/2001, Invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001, Invoice No. 0830/INV/SIP/X/2001, dan Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001(vide Bukti Kode P-13A s/d P-13D).

- c. KL I-7, Surat No. 009/SMP/I.2004 tanggal 23 Januari 2004 perihal Pembayaran Tagihan menyatakan sebagai berikut:

“ Menunjuk surat Bapak tanggal 29 Desember dan menegaskan pembicaraan dengan Bapak Ali perihal tersebut diatas, berikut kami sampaikan rencana/ usulan penyelesaian tunggakan-tunggakan kami

sebagai berikut....,”

Ini merupakan surat balasan/ jawaban atas surat yang telah diajukan oleh Kreditur Lain I yaitu surat tertanggal 29 Desember 2003 (vide Bukti Kode KL I-6) yang merupakan peringatan terakhir terhadap tagihan yang telah lama jatuh tempo atas invoice No. 0691/INV/SIP/VIII/2001, Invoice No. 0731/INV/SIP/VIII/2001, Invoice No. 0830/INV/SIP/X/2001, dan Invoice No. 0950/INV/SIP/XI/2001(vide Bukti Kode P-13A s/d P-13D).

Dari ketiga bukti tertulis yang dijelaskan diatas yang diajukan oleh Kreditur Lain I tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti, maka jelas dan tegas Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama sungguh-sungguh telah menjatuhkan putusan yang sewenang-wenang karena tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara a quo.

Apabila Judex Facti (Pengadilan Negeri) teliti dan seksama dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) maupun Kreditur lain dalam persidangan, maka akan terlihat bahwa Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) mempunyai lebih dari satu Kreditur dan tidak melunasi satu hutang yang telah jatuh tempo sebagaimana dipersyaratkan didalam kepailitan.

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim memberikan Pertimbangan yaitu bahwa alasan-alasan tersebut dapat

dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 4 menunjuk Faktur Penjualan dan P.5 sampai dengan P.7 menunjuk Tagihan-tagihan Pemohon Kasasi (PT. Indokemika Jayatama) pada PT. Indonesia Pasifik/Tony Royanto dan berdasarkan bukti T.1 menunjuk Tony Royanto adalah Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi);
2. Bahwa berdasarkan bukti P. 17 dan P. 18 Surat PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) telah membenarkan dan mengakui hutang pada PT. Indokemika Jayatama (Pemohon Kasasi) seperti tercantum pada *invoice* 07545; 07983; dan 08222 sesuai dengan surat tagihan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 ;
3. Bahwa berdasarkan bukti KL I-2, KL I-3 Dan KL I-13 menunjukkan bahwa PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) mempunyai utang pada Kreditor lain (PT. Sulfindo Adi Usaha) yang telah jatuh tempo;
4. Bahwa berdasarkan bukti KL II-2A sampai dengan KL II-2 R menunjukkan PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) mempunyai utang pada kreditor lain (PT. Eterindo Nusa Graha) yang telah jatuh tempo;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ternyata PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) sebagai debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena itu permohonan pailit pemohon telah

memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Indokemika Jayatama tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 21/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby tanggal 11 Agustus 2011.

Jadi, Mahkamah Agung memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) jatuh Pailit dengan segala akibat hukumnya.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan MA/RI.NO.693 K/ Pdt. Sus/2011 Tentang Permohonan Pailit terhadap PT. Sinar Mutiara Perkasa

- a. Analisis penulis terhadap hukum pembuktian dalam Putusan MA/RI.NO.693 K/ Pdt. Sus/2011

Dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Indokemika Jayatama terhadap PT. Sinar Mutiara Perkasa dimana permasalahannya bahwa PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon) melakukan transaksi pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada PT. Indokemika Jayatama (Pemohon). Terkait pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada Pemohon sebesar USD 211.200,00

(dua ratus sebelas ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) terhitung sejak tanggal 25 November 2004 Termohon hanya membayar kepada pemohon sebesar USD 76.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Namun, hingga Pernyataan Pailit ini diajukan oleh Pemohon, kenyataannya Termohon masih belum menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, yaitu sebesar USD 104.700,00 (seratus empat ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat). Disamping memiliki utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Satomo Indovyl Polymer sekarang menjadi PT. Sulfindo Adi Usaha (selanjutnya disebut PT. Sau) sebesar USD 19.000,00 (Sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat) dan pada PT. Eterindo Nusa Graha sebesar USD 124.000,48 (seratus dua puluh empat ribu dollar Amerika Serikat koma empat puluh delapan sen) belum dibayar lunas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai dua utang atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu Pemohon Pailit menganggap Pemohonan Pailit yang diajukan atas diri Termohon Pailit telah memenuhi Syarat kepailitan dengan sempurna.

Akan tetapi pada pengadilan tingkat pertama Permohonan Pailit dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim. Karena permohonan pailit tidak dikabulkan pada pengadilan tingkat pertama maka pemohon mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Jadi menurut penulis, seharusnya sebelum Majelis Hakim memutuskan suatu perkara maka terlebih dahulu harus memeriksa secara teliti setiap berkas ataupun bukti-bukti secara keseluruhan yang diajukan dalam persidangan. Dimana *judex facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana *judex facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Dimana Termohon Yang menyatakan bantahan bahwa tagihan–tagihan tersebut ditujukan kepada Bapak Tony Royanto dan bukan kepada PT. Sinar Mutiara Perkasa. Bisa dilihat dari putusan *judex facti* Pengadilan Pertama yang menyatakan “menimbang, bahwa debitor dalam permohonan pernyataan pailit ini adalah Termohon yaitu PT. Sinar Mutiara Perkasa, yang merupakan badan hukum, maka menurut majelis hakim suatu perseroaan Terbatas diwakili oleh direktornya.

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, ternyata tagihan-tagihan/invoice dari Pemohon ditujukan kepada Tony Royanto, yang berdasarkan bukti bertanda T-1 menjabat sebagai komisaris PT. Sinar mutiara perkasa (Termohon), suatu badan hukum (bukti surat bertanda T-4).

Dari putusan *judex Facti* tingkat pertama ini sangat jelas bahwa *judex facti* telah keliru dimana dalam putusan ini jelas mengatakan bahwa Tony Royanto tersebut menjabat sebagai komisaris dari PT. Sinar Mutiara Perkasa dan yang merupakan badan hukum. Menurut Majelis hakim suatu Perseroan Terbatas diwakili oleh direkturnya. Jadi bukti-bukti tagihan itu jelas sekali ditujukan kepada PT. Mutiara Perkasa yang dipimpin oleh Tony Royanto. Serta seluruh surat jawaban yang diberikan oleh Termohon menggunakan Kop Surat “PT. Sinar Mutiara Perkasa”, sehingga jelas bahwa sesungguhnya adanya hubungan hukum berupa pengakuan utang dari termohon kepada pemohon maupun terhadap kreditur lain I. berdasarkan fakta tersebut, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut diatas yang telah diajukan Pemohon Kasasi dan kreditur lain I dalam persidangan. Dengan tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan Pemohon dan kreditur lain I dalam persidangan, sehingga *judex Facti* telah menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon. Bahwa seharusnya apabila keseluruhan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon dan Kreditur lainnya dimana termohon sudah terbukti memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan

kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Termohon dinyatakan jatuh pailit beserta segala akibat hukumnya.

Pembuktian pada pengadilan niaga adalah pembuktian dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan, “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal pembuktian yaitu adanya batasan waktu dalam berperkara di Pengadilan Niaga yang berakibat pembuktiannya dilakukan secara sederhana (*sumiir*).

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun 1998 yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.⁵⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, h.148

didalilkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil Pemohon pada proses pemeriksaan kepailitan adalah alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan sumpah.

Dari deretan alat bukti tersebut, pada dasarnya alat bukti dapat dibagi menjadi alat bukti tertulis dan alat bukti tidak tertulis dan yang diprioritaskan disini adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis (surat) dapat berupa akta (baik otentik maupun akta dibawah tangan) dan surat bukan akta. Fungsi akta itu sendiri sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum serta sebagai alat pembuktian.

Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, foto copy artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan Mahkamah Agung dimana Termohon Pailit/debitur juga menjadi debitur/Termohon Pailit pada kasus lainnya.

Syarat-syarat dalam Pembuktian secara sederhana pada perkara ini penulis rasa sudah terpenuhi karena bukti-bukti yang dibutuhkan dalam syarat-syarat Pembuktian secara sederhana telah terpenuhi baik itu adanya dua kreditur atau lebih, utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

Bahwa bukti P1-P4 menunjukkan Faktur Penjualan dan P5-P-7 menunjukkan tagihan-tagihan Pemohon kasasi (PT. Indokemika Jayatama) pada PT. Indonesia Pasifik/Tony Royanto dan berdasarkan bukti T.1 menunjuk Tony Royanto adalah Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon kasasi) dan berdasarkan bukti P.17 dan P.18, Surat PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) telah membenarkan dan mengakui hutang pada PT. Indokemika Jayatama (Pemohon Kasasi) dan bukti bahwa PT. Sinar Mutiara Perkasa mempunyai utang pada kreditor lain yaitu PT. Sulfindo Adi Usaha yang telah jatuh tempo dan utang pada kreditor lain PT. Eterindo Nusa Graha yang juga telah jatuh tempo.

Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi Majelis hakim untuk menolak Permohonan Pailit dari pemohon. Karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas sudah jelas bahwa PT. Sinar Mutiara Perkasa (Termohon Kasasi) sebagai Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena itu permohonan pailit Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kedepannya diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara tersebut agar lebih teliti lagi agar tercipta keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi kreditor maupun debitor mendapatkan hak-haknya masing-masing.

- b. Analisis penulis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
MA/RI.NO.693 K/ Pdt. Sus/2011

Pertimbangan majelis hakim pada putusan MA/RI.NO.693 K/ Pdt. Sus/2011 berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan:

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dimana termohon benar adanya memiliki dua atau lebih kreditor yaitu selain pemohon yaitu PT. Sulfindo Adi Usaha dan PT. Eterindo Nusa Graha dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan bukti tersebut maka terdapat alasan yang cukup jelas untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Indokemika Jayatama.

Dan pertimbangan majelis hakim juga telah sesuai dengan syarat-syarat kepailitan. Dimana hakim sudah memenuhi asas keadilan bagi kedua belah pihak, baik itu kreditor maupun debitur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan dan paparkan pada IV Pembahasan diatas dan didasari atas masalah pokok diatas maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim pada pembuktian perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011 atas PT. Sinar Mutiara Perkasa oleh PT. Indokemika Jayatama telah terbukti secara sederhana (*sumir*) memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahwa unsur pertama yaitu adanya tiga kreditur, berdasarkan bukti-bukti di persidangan selain Pemohon yaitu PT. Indokemiko Jayatama, ada kreditur lain dari Termohon yaitu PT. Sulfindo Adi Usaha dan PT. Eterindo Nusa Graha. Selanjutnya unsur kedua yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah terpenuhi. Pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, Majelis Hakim menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.
2. Pada pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011 antara Pemohon PT. Indokemika Jayatama dan Termohon PT. Sinar Mutiara Perkasa dimana berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon (PT. Indokemika Jayatama) bahwa benar adanya bahwa

Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) memiliki dua atau lebih kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Majelis Hakim menyatakan Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) jatuh pailit dengan segala akibat hukumnya.

B. Saran

1. Seharusnya dalam memberikan putusannya Majelis hakim harus mempertimbangkan dan melihat seluruh bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan memberikan alasan yang jelas dalam memutuskan perkara. Sehingga tidak mencederai asas peradilan yang adil (*fair trial*). Dan menerapkan hukum pembuktian sederhana yang terdapat dalam undang-undang Kepailitan.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat membekali diri dengan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan kepailitan karena hal ini sering terjadi didalam hubungan industrial antara masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga kedepannya masyarakat bisa mengantisipasi diri jika terjadi hal yang demikian dan tidak kaku dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam perkara kepailitan pasti ada yang merasa dirugikan baik itu Debitur maupun Kreditur sehingga diharapkan kepada Pemerintah untuk memberi perlindungan dan penjaminan terhadap para pekerja pada perusahaan yang terjadi pailit karena apabila perusahaannya pailit maka ini akan sangat berdampak pada pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung,: Mandar Maju 1999).
- Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003)
- Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*, (Jakarta : Rineka Cipta 2007)
- H Man S. Sastra Widjaja, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, (PT. Alumni, Bandung, 2006).
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991)
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005)
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group 2008).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2005).
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta 1997).
- R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita 2004).
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2010)
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, (Malang; UMM Press 2008)
- Ricardo Simanjuntak, *UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh*, <http://www.hukumonline.com>, 2008, diakses pada tanggal 13 Februari 2013.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. ke-5, 2001).

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 2002)

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: 2007)

Sudarso, *Kamus Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta 2002)

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi ke 2, (Medan: Sofmedia 2010)

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang_undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).

Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.